

## Mentari Tawarkan Obral Obrol Langsung

**MAKASSAR** — Operator Indosat kian memanjakan konsumennya. Setelah hadir dengan program Obral Obrol Full, kini Mentari melanjutkan dengan program Mentari Obral Obrol Langsung dengan menyasar segmen semua kalangan.

“Kami akan selalu membawa senyum Indosat kepada pelanggan setia dengan berbagai program terbaru. Salah satunya dengan Obral Obrol Langsung ini,” kata Sales Area Manager Indosat Makassar, Lovely Sasame, dalam konferensi pers peluncuran program baru tersebut kemarin.

Keuntungan yang didapat dari paket tersebut adalah tarif awal yang lebih hemat. Hanya dengan Rp 50, para pelanggan Mentari dapat menelepon dan mengirim SMS ke semua operator sepanjang hari se-Indonesia selama 24 jam.

Program Mentari ini dapat langsung dinikmati oleh para pelanggan baru ataupun lama tanpa syarat dan registrasi awal dengan tarif awal yang cukup murah. Bahkan pelanggan bisa mendapat promo gratis pada menit berikutnya.

Mentari berharap dapat mencapai target sebesar 17 persen dari jumlah pelanggan yang ada, khusus wilayah Kota Makassar sebesar 40 persen dari total jumlah pelanggan setia Indosat se-Indonesia yang telah mencapai 44 juta pelanggan.

Sementara itu, operator XL, PT Excelcomindo Pratama Tbk., sebelumnya mengeluarkan sejumlah program promosi bagi pelanggannya yang berlaku sejak 13 Maret 2011 hingga 30 April 2011. Promo itu di antaranya Gratis Menelepon dari pukul 00.00-05.59 hanya dengan pulsa minimal Rp 1.500. Jika sisa pulsa kurang dari Rp 1.500, pelanggan dapat menikmati promo Gratis Nelpon ke Sesama XL dari pukul 00-05.59, setelah pemakaian Rp 300 (akumulasi) dan gratis menelepon berjam-jam pada pukul 06.00-10.59 dan pukul 11.00-17.00, ini berlaku setelah ada pemakaian dalam jumlah tertentu (akumulasi).

Telkomsel juga sebelumnya memanjakan para pelanggannya dengan sejumlah promo, di antaranya TalkMania. Program ini dapat dinikmati oleh para pelanggan Simpati dan Kartu As, di mana mereka dapat menelepon selama 100 menit dan tambahan 100 menit bonus setiap membeli paket Double Talkmania. Selain itu, terdapat promo gratis menelepon berjam-jam dengan cara mengaktifkan kartu perdana simPATI Freedom mulai 10 Maret 2011. ● ANDI NINNONG BUCIHAR

# KPPU Sulawesi Selatan: Garam Impor Perlu Diwaspadai

Menurut dinas perdagangan, masuknya garam impor tak perlu dipermasalahkan.

**MAKASSAR** — Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Sulawesi Selatan, dalam investigasinya, menemukan adanya garam impor ke daerah ini. Menurut Ketua KPPU Sulawesi Selatan Abdul Hakim Pasaribu, meskipun jumlahnya terbilang sedikit, tetap perlu diwaspadai karena kualitasnya sangat rendah dan tidak cocok untuk industri, tapi hanya cocok untuk konsumsi rumah tangga. “Garam yang masuk ke Sulawesi Selatan kebanyakan dari Australia dan Selandia Baru,” kata dia kemarin.

Menurut Hakim, Sulawesi Selatan sebenarnya termasuk daerah penghasil garam yang pusatnya berada di Kabupaten Jeneponto. Hanya, Sulawesi Selatan termasuk daerah yang konsumsi garamnya cukup tinggi dan ini tidak diimbangi oleh pasokan yang seimbang. Selama ini pasokan garam hanya berasal dari Jeneponto. “Produktivitas garam di Jeneponto masih sangat kecil untuk bisa memenuhi kebutuhan garam di Sulawesi Selatan,” katanya.

Dalam waktu dekat, kata Hakim, KPPU akan melakukan investigasi lanjutan untuk mengetahui jumlah garam impor yang masuk ke daerah ini. “Saat ini kami belum mempunyai data pastinya,” katanya. Selama ini, untuk memenuhi kebutuhan garam di daerah ini, pasokan didatangkan dari Jawa Timur.

Kepala Subdinas Perdagangan Dalam Negeri Sulawesi Selatan Hadi Basalamah mengatakan masuknya garam impor tidak perlu dipermasalahkan. Alasannya, kebutuhan garam provinsi ini relatif besar dan tidak seimbang dengan produktivitasnya, yang hanya berasal dari Jeneponto. “Apalagi kondisi cuaca ekstrem belakangan ini mengganggu proses pembuatan garam,” katanya. Kondisi cuaca ini membuat produksi garam berkurang dan mau tidak mau mereka harus mendatangkan garam dari luar.

Menurut Hadi, garam termasuk komoditas bebas yang tidak berada dalam pengawasan dinas perindustrian dan perdagangan. Tidak ada aturan khusus yang mengawasi peredarannya karena tidak ada undang-undang untuk itu, seperti halnya beras. “Garam masuk dalam klasifikasi barang bebas dan tidak diproteksi,” kata Hadi. Menurut dia, hal yang perlu diawasi adalah kualitasnya, bukan peredarannya.



Petani garam membawa hasil panen di lokasi tambak garam di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan.

Kabupaten Jeneponto merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Jeneponto. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 737,64 kilometer persegi dengan pen-

uduk sekitar 300 ribu jiwa. Jeneponto terletak di ujung bagian barat wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, yang jarak tempuhnya 90 kilometer dari Kota Makassar, ibu kota Sulawesi Selatan. ● ANISWATI SYAHRIH

## Realisasi PBB Terhambat Peraturan Daerah

**MAKASSAR** — Kebijakan pemerintah pusat yang mengubah Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagai pajak daerah masih mengalami banyak kendala dalam realisasinya.

Kepala Seksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Wilayah IV D Djonson Mamullang menyampaikan, hingga saat ini penerapan kebijakan tersebut berjalan sangat lambat. Padahal sosialisasi ini dilakukan oleh pemerintah sejak 2009.

“Secara keseluruhan, penerapan BPHTB dan PBB-P2 masih terkendala oleh peraturan daerah (perda) di setiap daerah yang masih dalam tahap penggodokan,” kata Djonson dalam acara “Bimbingan Teknis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Direktorat Pajak dan Retribusi Daerah” di Hotel Sahid Jaya kemarin.

Dalam kebijakan tersebut, pemerintah pusat memberi jangka waktu hingga 2014 terhadap setiap daerah agar mereka lebih mengoptimalkan potensi PBB-P2 dan BPHTB sesuai dengan prinsip desentralisasi fiskal

dan otonomi daerah.

Perubahan PBB-P2 dan BPHTB sebagai pajak daerah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 di mana semua kebijakan ditetapkan oleh daerah dengan penerimaan masuk dalam kategori pendapatan asli daerah.

Dengan kebijakan itu, diharapkan pemerintah daerah akan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pungutan, baik dari segi teknis operasional maupun pemanfaatannya. “Kami berharap masyarakat di

daerah dapat terlibat langsung dalam perumusan kebijakan dan dapat mengontrol penggunaan penerimaannya,” ujar Djonson.

Berdasarkan data yang ada, Makassar dan Gowa adalah dua kabupaten dan kota yang telah menerapkan PBB-P2 dan BPHTB di wilayah Sulawesi Selatan.

Menurut Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Arifuddin Dahlan, sekitar 25 persen dari 24 kabupaten dan kota di daerah ini menerapkan pajak daerah. “Selebihnya masih menung-

gu rancangan peraturan daerah yang masih dalam tahap pembahasan,” kata Dahlan.

Menurut dia, dalam pelaksanaan perubahan mekanisme tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu menyiapkan segala ketentuan yang diwajibkan oleh pemerintah pusat, seperti sarana dan prasarana, menyiapkan peraturan daerah, dan sebagainya. Hal yang terakhir adalah pembukaan rekening PBB-P2 dan BPHTB daerah. Sebab, mulai Januari 2011, rekening pusat PBB-P dan BPHTB telah ditutup. ● ANDI NINNONG BUCIHAR